

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan yang terdiri dari kepemilikan institusional, komite audit, peran perempuan dalam dewan komisaris, dan kualitas audit terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel kepemilikan institusional (KI) yang diproksikan dengan proporsi kepemilikan investor institusi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Koefisien regresi KI bernilai positif, namun nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 sehingga tidak cukup bukti statistik bahwa perubahan proporsi kepemilikan institusional akan menurunkan ataupun meningkatkan nilai FRAUD. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* belum dapat digunakan sebagai tolak ukur terjadinya kecurangan laporan keuangan. Maka dari itu hipotesis pertama ditolak.
2. Variabel komite audit (KA) yang diproksikan dengan proporsi anggota yang memiliki keahlian keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Koefisien KA bernilai positif dan nilai signifikansinya berada di atas 0,05, sehingga peningkatan proporsi anggota komite audit yang ahli di bidang keuangan tidak terbukti menurunkan ataupun meningkatkan nilai FRAUD. Hal ini menggambarkan bahwa karakteristik keahlian keuangan komite audit bukan merupakan salah satu tolak ukur yang secara empiris mampu menjelaskan terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals*. Maka dari itu hipotesis kedua ditolak.
3. Variabel peran perempuan dalam dewan komisaris (PPDK) yang diproksikan dengan proporsi keterwakilan perempuan dalam dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Koefisien PPDK bertanda negatif, namun tidak signifikan pada tingkat 5%. Artinya, meskipun secara arah peningkatan proporsi komisaris perempuan cenderung

berkaitan dengan penurunan nilai FRAUD, hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik. Hal ini menggambarkan bahwa proporsi perempuan dalam dewan komisaris pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* belum dapat dijadikan salah satu tolok ukur yang pasti dalam menjelaskan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Maka dari itu hipotesis ketiga ditolak.

4. Variabel kualitas audit (KUAL) yang diprosikan melalui spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Koefisien KUAL bernilai positif dengan nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga penggunaan auditor spesialis industri tidak terbukti menurunkan tingkat FRAUD pada perusahaan sampel. Hal ini menggambarkan bahwa penunjukan KAP spesialis industri bukan merupakan tolok ukur langsung terjadinya kecurangan laporan keuangan dalam konteks perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals*. Maka dari itu hipotesis keempat ditolak.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil, yaitu sebagai berikut:

1. Pengukuran variabel dependen kecurangan laporan keuangan dalam penelitian ini menggunakan *F-Score*, yaitu indikator berbasis model yang merefleksikan indikasi kecurangan. Pengukuran ini relevan sebagai early warning dan lebih konsisten antarperusahaan, serta mengurangi bias keterbatasan data kasus kecurangan yang cenderung terbatas dan tidak selalu terungkap. Namun, hasil penelitian perlu diinterpretasikan hanya sebatas indikasi, sehingga masih dimungkinkan adanya false positive/false negative dan perbedaan dengan kecurangan yang benar-benar terkonfirmasi.
2. Komposisi data pada penelitian ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 24,03% perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* dalam sampel yang berada pada kondisi terindikasi kecurangan laporan keuangan, sedangkan sisanya terklasifikasi pada kategori tidak terindikasi kecurangan laporan keuangan. Ketimpangan proporsi ini berpotensi membatasi variasi pada variabel dependen dan menurunkan sensitivitas model dalam menangkap perbedaan karakteristik antar kelompok.
3. Sampel penelitian hanya terbatas pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024

dengan teknik *purposive sampling*. Ruang lingkup sektor yang sempit dan periode pengamatan yang relatif singkat (3 tahun) membatasi generalisasi temuan ke sektor lain maupun ke horizon waktu yang lebih panjang. Karakteristik industri, tingkat regulasi, dan dinamika bisnis di sektor lain berpotensi menghasilkan hubungan yang berbeda antara mekanisme tata kelola, kualitas audit, dan kecurangan laporan keuangan.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan yang ada, penulis mengajukan sejumlah saran. Saran berikut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi di masa mendatang serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam penerapan tata kelola perusahaan dan praktik audit.

#### a. Saran Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan pengukuran variabel dengan menggunakan proksi yang lebih beragam. Kecurangan laporan keuangan dapat dibandingkan dengan model lain seperti Beneish M-Score, Jones/Modified Jones, maupun data kasus kecurangan laporan keuangan yang telah terungkap. Demikian pula, variabel tata kelola perusahaan dan kualitas audit dapat diperkaya dengan dimensi lain, misalnya tipe investor institusional, frekuensi dan kualitas rapat komite audit, posisi strategis komisaris perempuan, audit report lag, atau opini audit. Selain itu, dapat memperluas cakupan sektor di luar Consumer Non-Cyclicals, seperti sektor keuangan, infrastruktur, energi, atau teknologi, serta memperpanjang periode observasi agar dinamika perubahan tata kelola dan kecurangan laporan keuangan dapat tertangkap dengan lebih baik.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas model dengan menambahkan variabel lain yang relevan terhadap kecurangan laporan keuangan, seperti struktur kompensasi manajemen, leverage, dan kualitas pengendalian internal. Penelitian juga dapat dikembangkan model alternatif, seperti regresi logistik maupun spesifikasi non-linier, sesuai karakteristik data.

#### b. Saran Praktis

1. Bagi manajemen perusahaan disarankan untuk tidak memaknai tata kelola perusahaan hanya sebagai pemenuhan struktur formal, tetapi juga sebagai

praktik yang substantif. Meskipun dalam penelitian ini variabel tata kelola perusahaan belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, perusahaan tetap perlu memperkuat sistem pengendalian internal (SPI), memperjelas peran dan kewenangan komite audit, serta memastikan bahwa komisaris perempuan dan anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan area berisiko tinggi, khususnya terkait pelaporan keuangan.

2. Bagi auditor eksternal diharapkan tidak hanya mengandalkan reputasi atau spesialisasi industri semata, tetapi juga terus meningkatkan kualitas prosedur audit yang berorientasi pada deteksi kecurangan. Selain itu, auditor perlu menjaga independensi dan skeptisisme profesional, khususnya ketika menghadapi tekanan ekonomi atau hubungan jangka panjang dengan klien.
3. Bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya disarankan untuk tidak hanya menilai indikasi kecurangan laporan keuangan dari atribut formal tata kelola, tetapi juga memperhatikan indikator lain seperti pola pertumbuhan penjualan, konsistensi laba dengan arus kas, kebijakan akuntansi yang bersifat diskresioner, dan kualitas pengungkapan dalam laporan tahunan. Investor perlu lebih waspada terhadap perusahaan yang menunjukkan pertumbuhan tinggi namun tidak diimbangi dengan transparansi dan kualitas pengungkapan yang memadai.
4. Bagi regulator dan pembuat kebijakan diharapkan dapat menggunakan temuan ini sebagai masukan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan di bidang tata kelola perusahaan dan audit eksternal. Kebijakan tidak hanya perlu mengatur keberadaan struktur tata kelola (seperti komite audit atau keterwakilan perempuan), tetapi juga mendorong peningkatan kualitas peran dan fungsi, misalnya melalui kewajiban pengungkapan yang lebih rinci mengenai aktivitas komite audit, frekuensi rapat, kompetensi anggota, serta interaksi dengan auditor eksternal.